

# BAB IV

## STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Analisis Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

#### 4.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Untuk mendapatkan isu-isu strategis pada kondisi sekarang dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bandung Barat (KBB), maka digunakan pendekatan analisa SWOT dengan menggunakan data primer dari hasil kelompok diskusi terfokus, data sekunder dari berbagai sumber (SKPD dan DPRD).

Pendekatan analisa SWOT akan menghasilkan berbagai isu internal (ke dalam) yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta isu eksternal (ke luar) yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

##### 4.1.1.1 Kekuatan

Kondisi Geografis

- a. Letak wilayah yang strategis, berada di sekitar kota Bandung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat ibukota Provinsi Jawa Barat, yang mendukung pengembangan sektor jasa dan perdagangan, terutama di wilayah Metropolitan Bandung bagian Barat; serta

merupakan pintu gerbang ibukota Provinsi Jawa Barat dari bagian Barat (Cipatat dan Cikalongwetan) dari bagian utara (Lembang);

- b. Kondisi alamiah Geofisik wilayah berupa pegunungan, dataran, dan perairan yang sesuai dan mendukung pengembangan agribisnis, agroindustri, agrowisata, dan wisata alam (panorama/pemandangan yang indah) di Lembang dan Cipatat;
- c. Cuaca pegunungan yang sejuk di daerah tropis menjadi daya tarik wisata;
- d. Tersedianya sumberdaya air yang cukup berlimpah untuk berbagai kepentingan, baik nasional, regional, maupun lokal; diantaranya sebagai penyedia air baku, budidaya perikanan, sumber energi (diantaranya PLTA Saguling dan Cirata sebagai pemasok listrik Jawa Bali) dan pariwisata;
- e. Kaya akan potensi sumberdaya alam, terutama pertambangan galian C dan panas bumi.

#### Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah penduduk yang cukup besar, berpotensi sebagai tenaga produktif dan pasar yang potensial;
- b. IPM KBB yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir (2003-2007);
- c. Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.

#### Kondisi Perekonomian

- a. Kawasan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, terutama industri manufaktur, perdagangan, jasa, hotel, dan restoran;
- b. Sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan produk unggulan dan merupakan sentra pemasok utama skala regional Jawa Barat dan DKI Jakarta;
- c. Potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata ziarah/cagar budaya, wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (observatorium Bosscha), wisata belanja, wisata kuliner, dan wisata lainnya;
- d. Potensi wisata di Cikalongwetan dan Cipeundeuy.
- e. Kawasan konservasi di Rongga dan Gununghalu.
- f. Kawasan maju berbasis pertanian di Lembang dan Cipatat,
- g. Potensi hortikultura dan peternakan di Lembang, Cisarua, dan Parongpong;
- h. Pertanian pangan yang berkembang di Lembang;

- i. Pertanian pangan dan perkebunan yang sedang berkembang di Cipatat;
- j. Potensi perkebunan di Cipeundeuy;
- k. Potensi perikanan di Cipeundeuy, Cililin, dan Cihampelas;
- l. Potensi sawah di Sidangkerta, Gununghalu, dan Rongga;
- m. Kawasan perdagangan (potensi *outlet*) di Padalarang, Ngamprah, Batujajar, dan Lembang.

#### Sosial Budaya

- a. Potensi budaya lokal yang masih terpelihara dengan baik;
- b. Masih terpeliharanya budaya gotong royong pada masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.

#### Sarana dan Prasarana

- a. Tersedianya sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan;
- b. Tersedianya prasarana wilayah, diantaranya: jaringan jalan (termasuk akses yang tinggi ke jaringan jalan tol dan jalur poros nasional), dan jaringan jalan penghubung antar wilayah, jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, stasiun Kereta Api (Padalarang, Rende, Sukatani), dan sub terminal.

#### Pemerintahan Umum

- a. Stabilitas keamanan yang terkendali;
- b. Kondisi politik yang kondusif;
- c. Sistem pemerintahan Kabupaten Barat yang memiliki rentang kendali (*span of control*) yang lebih dekat terhadap proses pembangunan daerah

#### 4.1.1.2 Kelemahan

##### Kondisi Geografis

- a. Adanya beberapa kawasan rawan bencana alam (longsor dan patahan/amblesan);
- b. Meningkatnya alih fungsi lahan (dari budidaya pertanian menjadi budidaya non pertanian).

##### Sumber Daya Manusia

- a. Sebesar 63,34 % penduduk 10 tahun ke atas berijazah lebih rendah dari SMP;
- b. Tingkat Pengangguran sebesar 17 %;

- c. Sebagian masyarakat yang menggantungkan ekonominya ke Cimahi, yaitu masyarakat yang tinggal di Cihampelas, Cililin, dan Sindangkerta.
- d. Kurangnya pengembangan SDM termasuk pola pelatihan terlalu banyak teori dan tidak membekali, menimbulkan kurangnya tenaga ahli di bidang UKM dan koperasi;
- e. Kualitas & kuantitas PNS belum memadai karena kebijakannya kurang mendukung sehingga penyelenggaraan pemerintah tidak optimal;
- f. Terbatas kualitas SDM (aparatur & masyarakat/swasta bidang kepariwisataan & lingkungan hidup, akibatnya beberapa program SKPD terkait tidak fokus pada wisata alam;
- g. Belum berkembangnya teknologi tepat guna;
- h. Rendahnya kemampuan masyarakat;
- i. Terbatas kualitas SDM masyarakat di bidang kepariwisataan & lingkungan hidup, akibatnya beberapa program SKPD terkait tidak fokus pada wisata alam;
- j. Masyarakat kurang memahami peraturan-peraturan daerah sehingga melakukan aktifitasnya secara bebas;
- k. Orientasi berpikir/budaya sebagian masyarakat berorientasi jangka pendek, cenderung melakukan pekerjaan berdampak pada kerusakan lingkungan;
- l. Kurangnya angkatan kerja/masyarakat peminat di bidang Agroindustri sehingga tidak memiliki keahlian;
- m. Masyarakat di objek wisata belum sadar wisata;
- n. Pengetahuan petani relatif masih rendah sehingga teknologinya belum maju, pola budidaya yang sama, dan rendahnya pengelolaan pasca panen; .
- o. Lemahnya lembaga masyarakat desa;
- p. Belum berkembangnya teknologi tepat guna;
- q. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
- r. Belum meratanya penyebaran guru yang berkualitas;
- s. Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan.

#### Perekonomian

- a. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
- b. Masih kurangnya promosi potensi investasi daerah, terutama di bidang agroindustri dan industri manufaktur;

- c. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Belum optimalnya peran kelembagaan perekonomian desa;
- e. Koperasi di desa kurang hidup, sehingga berkembang pesat sistem ijon;
- f. 54,57 % penduduk bekerja mempunyai upah/gaji < Rp 500.000,-/bulan;
- g. Meskipun industri berkontribusi besar terhadap PDRB, namun secara proporsional belum mampu menyerap tenaga kerja sebesar sektor pertanian;
- h. Keberlanjutan ekonomi sektor penggalian dan penambangan;
- i. Kurangnya peran serta swasta dan BUMN mengakibatkan beberapa potensi alam aset PERHUTANI sulit untuk dikembangkan;
- j. Pendapatan tinggi dari produk hutan, namun hal tersebut sebagian berasal dari hasil kegiatan penebangan liar;
- k. Pertanian hortikultura dan peternakan di Cisarua & Parongpong belum memberikan nilai tambah tinggi;
- l. Kawasan industri tidak berbasis sumber daya lokal;
- m. Aktivitas pertanian di Lembang tidak mendorong serapan tenaga kerja;
- n. Kesulitan akses penjual perikanan di Cipeundeuy sehingga hasil perikanan hanya dijual ke Cipatat dan Batujajar;
- o. Kebijakan belum mendukung agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan;
- p. Belum tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA);
- q. Banyak Lahan dengan status tanah tidak jelas;
- r. Keterkaitan dan efek ganda sektor industri terhadap sektor-sektor lainnya masih relatif rendah;
- s. Kurangnya modal usaha baik karena kurang fasilitas permodalan dari pemerintah atau sulitnya mengakses lembaga perbankan;
- t. Terbatasnya anggaran pengembangan wisata alam;
- u. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar (37,8%).

#### Sosial Budaya

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Masyarakat lebih menyukai dengan program bantuan instan

#### Sarana dan Prasarana

- a. Belum meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;

- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai;
- c. Masih rendahnya layanan jaringan irigasi;
- d. Minimnya pelayanan SMA di Rongga;
- e. Tidak ada pasar induk;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mekanisasi dan pupuk;
- g. Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan masih terbatas, termasuk sarana transportasi & terminal terpadu.

#### Pemerintahan Umum

- a. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Kualitas & kuantitas PNS belum memadai karena kebijakannya kurang mendukung sehingga penyelenggaraan pemerintah tidak optimal;
- c. Kebijakan yang belum mendukung dan birokrasi yang terlalu rumit dan membingungkan serta penegakan hukum yang rendah menimbulkan tidak sinergi antara bantuan dengan kebutuhan, tidak berkembangnya iklim usaha, munculnya sistem kekeluargaan yang menurunkan semangat dan kejujuran masyarakat;
- d. Belum optimalnya penerapan *e-government*;
- e. Masih kuatnya paradigma "keterbatasan dana" sehingga menghambat kreatifitas dalam pengembangan;
- f. Belum jelasnya program pendorong kabupaten untuk otonomi desa;
- g. Belum ada penataan tata ruang kawasan pengembangan sehingga tidak ada kepastian hukum akibatnya investor belum tertarik,
- h. Belum optimalnya pengelolaan kawasan lindung (Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cisarua, Cikalongwetan).

### 4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

#### 4.1.2.1 Peluang

##### Geografis

- a. Adanya kemudahan aksesibilitas baik ke ibukota Negara maupun ibukota Provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

##### Politik

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan wisata Daerah Jawa Barat;
- b. Sebagai salah satu wilayah yang menjadi wilayah prioritas pengembangan di wilayah Jawa Barat;

- c. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- d. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat;
- e. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin;
- f. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan transportasi darat sebagai pendukung peningkatan aktivitas ekonomi Kabupaten Bandung Barat;
- g. Kebijakan Nasional terkait dengan agropolitan dan penataan ruang kawasan perdesaan (sesuai dengan UU 26 tahun 2007);
- h. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- i. Target IPM Jawa Barat tahun 2015 sebesar 80;
- j. Adanya program pengembangan agribisnis dari Jawa Barat;
- k. Program luar negeri banyak berfokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Semakin kuatnya political will dan komitmen pemerintah pusat dalam penanggulangan korupsi.

#### Ekonomi

- a. Adanya era perdagangan bebas;
- b. Adanya tawaran kerjasama/kemitraan dari pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri (pemerintah, investor, universitas, LSM, dan masyarakat luas);
- c. Peluang akses pasar ke DKI Jakarta dan Kota Bandung;
- d. Peluang program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan.

#### Sosial

- a. Semakin berkembangnya fenomena kembali ke alam (*back to the nature*)

#### Teknologi

- a. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- b. Target Jabar *Cyber Province* tahun 2012

#### 4.1.2.2 Ancaman

##### Geografis

- a. Jangkauan pelayanan pada masyarakat di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya belum optimal;
- b. Adanya berbagai bahaya bencana alam regional Cekungan Bandung.

##### Politik

- a. Kesenjangan ADD, DAU, DAK, dan APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat dengan daerah lain;
- b. Belum terpadunya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat;
- c. Orientasi pembangunan nasional yang eksploitatif (pertumbuhan) – jangka pendek.

##### Ekonomi

- a. Dampak-dampak krisis ekonomi global: menurunnya permintaan di pasar global untuk produk-produk berorientasi ekspor, penurunan investasi pembangunan, penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional dan regional, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, dan lain-lain;
- b. Pembangunan Jalan Tol Cipularang yang tidak terintegrasi dengan daerah yang dilintasinya;
- c. Keberadaan Jalan Tol Cipularang yang mematikan perekonomian sepanjang Jalan Cikalongwetan-Padalarang;
- d. Kegiatan penambangan dan penebangan hutan liar (tidak berijin);
- e. Pengaruh pertumbuhan metropolitan Bandung terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kawasan berfungsi lindung;
- f. Maraknya penyelundupan barang dari luar negeri (*black market*);
- g. Orientasi ekonomi (khususnya industri) yang tidak berbasis sumber daya lokal.

##### Sosial

- a. Program-program kesejahteraan rakyat (nasional) jangka pendek yang tidak mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kegotong-royongan;
- b. Masuknya informasi dan budaya luar yang berpengaruh negatif kepada masyarakat melalui berbagai media.

##### Teknologi



- Penyalahgunaan teknologi informasi (termasuk internet) untuk kepentingan tidak produktif.

## 4.2 Isu Strategis

Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai sehingga menghambat pelayanan publik;
- b. Belum adanya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap sehingga kualitas dan kuantitas PNS belum memadai akibatnya penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
- c. Perangkat kebijakan yang belum mendukung, birokrasi yang terlalu rumit serta penegakan hukum yang lemah mengakibatkan tidak sinerginya antara bantuan dengan kebutuhan, tidak berkembangnya iklim usaha, dan munculnya sistem kekeluargaan yang menurunkan semangat dan kejujuran masyarakat;
- d. Masuknya informasi dan budaya luar yang berpengaruh negatif kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk kesalahan penggunaan internet untuk kepentingan tidak produktif;
- e. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas permodalan;
- f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan;
- g. Implementasi berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat;
- h. Masih kurangnya promosi potensi informasi daerah terutama di bidang agroindustri, wisata alam dan industri manufaktur;
- i. Belum lengkapnya perangkat peraturan daerah yang mendukung visi dan misi KBB untuk mendorong agribisnis dan wisata ramah lingkungan;
- j. Kurang didorongnya pengembangan industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal, berwawasan lingkungan, dan memperhatikan keadilan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
- k. Belum ada penataan ruang kawasan pengembangan sehingga kepastian hukum susah diwujudkan, akibatnya pengaruh *urban sprawl* yang memicu alih fungsi lahan cukup besar dan keterkaitan dengan

kota metropolitan mengakibatkan terjadinya *backwash* untuk sumber daya hutan dan bahan galian C;

- l. Kurang diperhatikannya keberadaan Tol Cipularang yang mematikan perekonomian sepanjang Jalan Raya Cikalongwetan-Padalarang dan tidak terintegrasi dengan daerah yang dilintasinya;
- m. Masih adanya perilaku-perilaku masyarakat yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan;
- n. Kurang dilakukannya penegakan hukum sehingga banyak terjadi penebangan liar, alih fungsi lahan, dan pembangunan di daerah rawan bencana;
- o. Kurangnya peran serta swasta dan BUMN mengakibatkan terhambatnya pembangunan karena keterbatasan dana, serta beberapa potensi alam seperti aset Perhutani sulit untuk dikembangkan;
- p. Belum meratanya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi, jaringan irigasi, pendidikan, energi, dan kesehatan;
- q. Banyak program pemerintah kurang mendukung kepada akselerasi otonomi desa;
- r. Masih banyaknya pengangguran dan Kemiskinan.

### 4.3 Strategi Pembangunan

Berbagai isu strategis di atas dapat diselesaikan dengan lima (5) strategi, yaitu:

1. Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri;
3. Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan kesadaran berkoperasi;
5. Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa.

### 4.4 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Pelaksanaan strategi unggulan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan program yang mengiringinya. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

## 4.4.1 Kebijakan

### 4.4.1.1 Strategi 1: Penataan SDM

Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, memiliki beberapa kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendukung visi-misi Kabupaten Bandung Barat;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan rasa aman bagi golongan pekerja.

### 4.4.1.2 Strategi 2: Agroindustri

Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri, memiliki beberapa kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan petani dalam bidang agribisnis;
2. Melakukan pendampingan untuk menjaga berjalannya program;
3. Me-revitalisasi penyuluhan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana;
5. Mengembangkan koperasi;
6. Membuat kebijakan perluasan areal tanam;
7. Mempromosikan potensi usaha daerah.

### 4.4.1.3 Strategi 3: Wisata berwawasan lingkungan

Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan, memiliki beberapa kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan wisata alam;
2. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
3. Memenuhi anggaran untuk pengembangan wisata alam;
4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan wisata alam yang kuat dan berkesi-nambungan;
5. Mengembangkan informasi dan publikasi mengenai daerah wisata di Kabupaten Bandung Barat.

#### 4.4.1.4 Strategi 4: UMKM dan Koperasi

Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta kesadaran berkoperasi, memiliki beberapa kebijakan yaitu:

1. Membuat kebijakan yang mendukung UMKM dan Koperasi;
2. Mengembangkan kelembagaan koperasi;
3. Mengembangkan produk dan akses pasar.

#### 4.4.1.5 Strategi 5: Otonomi desa

Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa, memiliki satu kebijakan yaitu 'Meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pihak'.

### 4.4.2 Program

Jenis program yang dilaksanakan sebagai strategi teridentifikasi sejumlah 76 buah yang terbagi ke dalam: strategi 1 dengan 21 program, strategi 2 dengan 21 program, strategi 3 dengan 14 program, strategi 4 dengan 11 program, dan strategi 5 dengan 9 program. Selengkapnya lihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Strategi dan Program

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM
<b>I. Strategi : Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat</b>		
1	I.A.1	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
2	I.A.2	Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam.
3	I.A.3	Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan anggaran secara transparan
4	I.A.4	Pengawasan dan penegakan hukum atas praktek-praktek korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih
5	I.B.1	Pemekaran wilayah
6	I.C.1	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yang mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam
7	I.C.2	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri)
8	I.C.3	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM
9	I.C.4	Sosialisasi untuk pengembangan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri) dan pengelolaan wisata alam
10	I.C.5	Peningkatan keswadayaan masyarakat
11	I.C.6	Pengadaan beasiswa pendidikan
12	I.D.1	Peningkatan sarana prasarana kesehatan khususnya di wilayah perdesaan
13	I.D.2	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dari tingkat SLTP-PT di kecamatan (dan akses transportasinya)
14	I.D.3	Mendirikan perpustakaan desa
15	I.D.4	Peningkatan sarana prasarana keagamaan
16	I.D.5	Peningkatan sarana prasarana pemukiman
17	I.D.6	Pembangunan sarana prasarana pemerintahan
18	I.D.7	Pengadaan utilitas (telepon, listrik, air bersih)
19	I.D.8	Infrastruktur skala kabupaten
20	I.E.1	Penyediaan jaminan sosial bagi golongan pekerja
21	I.E.2	Penyediaan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja
<b>II. Strategi : Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri</b>		
22	II.A.1	Pelibatan masyarakat untuk memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis dan agroindustri
23	II.A.2	Penguatan kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam
24	II.A.3	Peningkatan kapasitas SDM petani dengan penyebarluasan penerapan teknologi
25	II.A.4	Penerapan mitigasi bencana
26	II.B	Pendampingan untuk menjaga berjalannya program
27	II.C.1	Fasilitasi penempatan PPL per desa
28	II.C.2	Peningkatan kemampuan & sarana penyuluhan
29	II.D.1	Penyediaan alat-alat pertanian, pupuk pertanian
30	II.D.2	Peningkatan budidaya pasca panen
31	II.D.3	Penerapan teknologi tepat guna
32	II.D.4	Perbaikan dan perluasan infrastruktur pendukung pertanian
33	II.D.5	Pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian
34	II.D.6	Pembangunan fasilitas pengembangan infrastruktur untuk pengembangan agroindustri skala besar
35	II.E.1	Pembentukan koperasi
36	II.E.2	Pengadaan fasilitas pemodal
37	II.E.3	Pengembangan usaha/jasa untuk peningkatan nilai tambah petani
38	II.E.4	Pengembangan pemasaran
39	II.F.1	Pencegahan konversi lahan
40	II.F.2	Pencetakan lahan pertanian baru
41	II.F.3	Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas produktif

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM
42	II.G.1	Pengenalan potensi daerah melalui website
<b>III. Strategi : Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan</b>		
43	III.A.1	Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat di obyek wisata
44	III.A.2	Peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM aparat dalam bidang kepariwisataan
45	III.B.1	Pembangunan dan pemeliharaan sapras untuk pengelolaan obyek-obyek wisata
46	III.B.2	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam
47	III.B.3	Pengembangan program penghijauan
48	III.C.1	Pencarian dukungan dari pemerintah
49	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta
50	III.C.3	Pengembangan kerjasama dengan Perhutani
51	III.D.1	Pengaturan pengelolaan wisata
52	III.D.2	Penerapan keterpaduan SKPD
53	III.D.3	Penerapan legalitas kepariwisataan
54	III.D.4	Peningkatan dukungan politik dalam pengembangan wisata alam
55	III.E.1	Pengkajian
56	III.E.2	Promosi
<b>IV. Strategi : Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi</b>		
57	IV.A.1	Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum
58	IV.A.2	Penyediaan layanan koperasi syariah
59	IV.A.3	Pembuatan perizinan satu atap
60	IV.A.4	Peningkatan akses permodalan
61	IV.A.5	Pembuatan baseline UKM-koperasi
62	IV.B.1	Peningkatan kualitas SDM
63	IV.B.2	Peningkatan kemandirian desa dalam pengembangan UKM & koperasi
64	IV.B.3	Pembentukan forum koordinasi UKM-koperasi
65	IV.C.1	Pembentukan sentra produk unggulan UKM
66	IV.C.2	Peningkatan akses pasar
67	IV.C.3	Peningkatan akses transportasi
<b>V. Strategi : Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa</b>		
68	V.A.1	Peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat desa dan masyarakat
69	V.A.2	Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat
70	V.A.3	Pelaksanaan program oleh pemerintah harus mengacu pada penguatan otonomi desa
71	V.B.1	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung desa dikelola oleh lembaga masyarakat desa

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM
72	V.B.2	Peningkatan dan pelestarian budaya gotong royong
73	V.B.3	Pejabat desa dan pemerintah (RT, RW, kepala desa, dan camat) memberikan contoh nyata oleh dalam bergotong royong
74	V.B.4	Peningkatan perekonomian desa
75	V.B.5	Pemberian akses permodalan pertanian
76	V.B.6	Pembuatan perdes pembangunan desa

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Strategi 1 adalah strategi dengan program terbanyak karena penataan dan pembinaan SDM yang dimuat tidak hanya SDM masyarakat saja melainkan juga SDM aparatur pemerintahan. Penataan dan pembinaan SDM masyarakat urusannya merentang mulai dari program aktivitas ekonomi, kesehatan hingga keagamaan sedangkan SDM aparatur memuat peningkatan kapasitas dan perbaikan kinerja, juga tidak terlepas dari pembinaan keagamaan pula. Satu hal yang patut dicermati pada Strategi 1 ini adalah program pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan mengingat program ini merupakan kebutuhan mutlak dari kabupaten yang baru.

Strategi 5 menjadi strategi dengan jumlah program paling sedikit karena strategi ini telah bersifat spesifik yaitu mengenai otonomi desa. Sebagai sebuah kabupaten dengan pencirinya adalah dominannya kawasan perdesaan maka penguatan otonomi desa merupakan hal strategis untuk dilakukan.

Selain kedua strategi tersebut, terdapat tiga strategi lainnya yang secara umum memuat akselerasi pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis potensi lokal yang ada. Potensi lokal yang dikenali dan hendak dikembangkan adalah agribisnis, agrowisata, dan wisata alam. Potensi lokal inilah yang menjadi keunggulan komparatif kabupaten Bandung Barat sehingga menjadi strategis sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

#### 4.4.3 Arah Program

Arah program (atau disebut juga sebagai kebijakan) memuat mengenai arahan pelaksanaan setiap program pada masing-masing strategi. Kebijakan

membantu pelaksanaan program agar senantiasa berada di jalur yang benar dan tidak keluar dari strategi dan sasaran yang ditetapkan.

Terdapat 20 kebijakan yang mengarahkan ke-76 program sehingga senantiasa dapat selaras dengan kelima strategi yang ada. Diantara ke-20 kebijakan tersebut adalah (i) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, (ii) meningkatkan kemampuan petani dalam bidang agribisnis, (iii) meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan wisata alam, (iv) membuat kebijakan yang mendukung UKM dan koperasi, dan (v) meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pihak. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 4.4.4 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa hari demi hari organisasi atau program yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Beberapa pertimbangan untuk indikator pembangunan berkelanjutan berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan: indikator akhir harus sederhana.



- b. Ruang lingkup: indikator harus meliputi seluruh aktivitas manusia yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan, dan tumpang tindih antar masing-masing indikator harus seminimal mungkin.
- c. Kuantifikasi: elemennya harus dapat diukur.
- d. Pengukuran: elemen harus dapat dipantau untuk menunjukkan kecenderungan
- e. Sensitivitas: indikator yang terpilih cukup sensitive terhadap perubahan penting dalam karakteristik lingkungan
- f. Batas waktu: frekuensi dan lingkup elemen harus dapat menunjukkan identifikasi waktu dari *trend*.

Menurut Rustiadi et al. (2007) setidaknya terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan, yakni: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Arahan terhadap indikator program dan indikator kinerja pembangunan daerah untuk Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan bidang terkait visi dan misi KKB dapat dilihat pada Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

## 4.5 Penbandingan Strategi dan Program dengan Nomenklatur

Setiap program pembangunan daerah sudah dipayungi oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga diharapkan ada kesesuaian antara nama strategi dan program dengan aturan yang berlaku. Selengkapnya lihat Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Penbandingan strategi dan program dengan nomenklatur

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
<b>I. Strategi :</b>			
<b>Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat</b>			
1	I.A.1	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2	I.A.2	Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3	I.A.3	Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan anggaran secara transparan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	I.A.4	Pengawasan dan penegakan hukum atas praktek-praktek korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5	I.B.1	Pemekaran Wilayah	Penataan Daerah Otonom Baru
6	I.C.1	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yg mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Kerjasama Informasi dengan Mas Media
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
7	I.C.2	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Peningkatan Kesempatan Kerja
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
			Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
			Pendidikan Menengah
			Pendidikan Non Formal
8	I.C.3	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam	Pengembangan Kemitraan
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Pengembangan Kemitraan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
			Pendidikan Menengah
			Pendidikan Non Formal
			Pengembangan Kemitraan
9	I.C.4	Sosialisasi untuk pengembangan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri) dan pengelolaan wisata alam	Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Penataan Struktur Industri
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Kerjasama Informasi dengan Mas Media
10	I.C.5	Peningkatan keswadayaan masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
11	I.C.6	Pengadaan beasiswa pendidikan	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pendidikan Menengah
12	I.D.1	Peningkatan sarana prasarana kesehatan khususnya di wilayah perdesaan	Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
13	I.D.2	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dari tingkat SLTP-PT di kecamatan (dan akses transportasinya)	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pendidikan Menengah
			Pendidikan Non Formal
			Pendidikan Luar Biasa
14	I.D.3	Mendirikan perpustakaan desa	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
15	I.D.4	Peningkatan sarana prasarana keagamaan	
16	I.D.5	Peningkatan sarana prasarana permukiman	Pengembangan Perumahan
17	I.D.6	Pembangunan sarana prasarana pemerintahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18	I.D.7	Pengadaan utilitas (telepon, listrik, air bersih)	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan,
			Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
19	I.D.8	Infrastruktur skala kabupaten	Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
20	I.E.1	Penyediaan jaminan sosial bagi golongan pekerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
21	I.E.2	Penyediaan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja	Peningkatan Kesempatan Kerja
<b>II. Strategi :</b>			
<b>Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri</b>			
22	II.A.1	Pelibatan masyarakat untuk memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis dan agroindustri	Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Penataan Struktur Industri
23	II.A.2	Penguatan kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
23	II.A.2	Penguatan kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Perencanaan dan Pengembangan Hutan
			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
			Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
24	II.A.3	Peningkatan kapasitas SDM petani dengan penyebar luasan penerapan teknologi	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
			Pengembangan Budidaya Perikanan
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
25	II.A.4	Penerapan mitigasi bencana	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Perencanaan dan Pengembangan Hutan
			Pengembangan Budidaya Perikanan

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
26	II.B	Pendampingan untuk menjaga berjalannya program	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
27	II.C.1	Fasilitasi penempatan PPL/desa	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
28	II.C.2	Peningkatan kemampuan dan sarana penyuluhan.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
29	II.D.1	Penyediaan alat-alat pertanian, pupuk pertanian.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
30	II.D.2	Peningkatan budidaya pasca panen	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
31	II.D.3	Penerapan teknologi tepat guna	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Budidaya Perikanan
32	II.D.4	Perbaiki dan perluasan infrastruktur pendukung pertanian	Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
33	II.D.5	Pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
34	II.D.6	Pembangunan fasilitas pengembangan infrastruktur untuk pengembangan agroindustri skala besar	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
35	II.E.1	Pembentukan koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
36	II.E.2	Pengadaan fasilitas pemodal	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
37	II.E.3	Pengembangan Usaha/Jasa untuk peningkatan nilai tambah petani	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
38	II.E.4	Pengembangan Pemasaran	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
39	II.F.1	Pencegahan konversi lahan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
40	II.F.2	Pencetakan lahan pertanian baru	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
41	II.F.3	Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas produktif	Peningkatan Kesejahteraan Petani
42	II.G.1	Pengenal potensi daerah melalui website	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
<b>III. Strategi :</b>			
<b>Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan</b>			
43	III.A.1	Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat di obyek wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
44	III.A.2	Peningkatan kapasitas kualitas&kuantitas SDM aparat	Pengembangan Kemitraan

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
		dalam bidang kepariwisataan	
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Pendidikan Menengah
45	III.B.1	Pembangunan dan pemeliharaan sarana untuk pengelolaan obyek-obyek wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata
46	III.B.2	Membangun atau memperbaiki sarana & prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam	Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
47	III.B.3	Pengembangan program penghijauan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
48	III.C.1	Pencarian dukungan dari pemerintah	Pengembangan Destinasi Pariwisata
49	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta	Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Pengembangan Kemitraan
50	III.C.3	Pengembangan kerjasama dengan Perhutani	Pengembangan Destinasi Pariwisata
51	III.D.1	Pengaturan pengelolaan wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata
52	III.D.2	Penerapan keterpaduan SKPD	Pengembangan Kemitraan
53	III.D.3	Penerapan legalitas kepariwisataan	Penataan Peraturan Perundang-undangan
54	III.D.4	Peningkatan dukungan politik dalam pengembangan wisata alam	Pengembangan Kemitraan
55	III.E.1	Pengkajian	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
56	III.E.2	Promosi	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
<b>IV. Strategi :</b>			
<b>Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi</b>			
57	IV.A.1	Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum	Penataan Peraturan Perundang-undangan
			Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
			Penataan Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
58	IV.A.2	Penyediaan layanan koperasi syariah	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
59	IV.A.3	Pembuatan perizinan satu atap	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
60	IV.A.4	Peningkatan akses permodalan	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
61	IV.A.5	Pembuatan baseline UKM-koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
62	IV.B.1	Peningkatan kualitas SDM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	PERMENDAGRI 13/2006 DAN PERMENDAGRI 59/2007
			Kecil Menengah
			Pendidikan Kedinasan
63	IV.B.2	Peningkatan kemandirian desa dlm pengembangan UKM & koperasi	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
64	IV.B.3	Pembentukan forum koordinasi UKM-koperasi	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
65	IV.C.1	Pembentukan sentra produk unggulan UKM	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
66	IV.C.2	Peningkatan akses pasar	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
67	IV.C.3	Peningkatan akses transportasi	Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
<b>V. Strategi :</b>			
<b>Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa</b>			
68	V.A.1	Peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat desa dan masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
69	V.A.2	Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
			Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
70	V.A.3	Pelaksanaan program oleh pemerintah harus mengacu pada penguatan otonomi desa	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
71	V.B.1	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung desa dikelola oleh lembaga masyarakat desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
72	V.B.2	Peningkatan dan pelestarian budaya gotong royong	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
73	V.B.3	Pejabat desa dan pemerintah (RT, RW, kepala desa, dan camat) memberikan contoh nyata oleh dalam bergotong royong	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
74	V.B.4	Peningkatan perekonomian desa	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
75	V.B.5	Pemberian akses permodalan pertanian	Peningkatan Kesejahteraan Petani
76	V.B.6	Pembuatan perdes pembangunan desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Sumber : Hasil Analisis, 2008

## 4.6 Keterkaitan Program dan SKPD

Alat analisa yang digunakan selanjutnya adalah keterkaitan antara program dan SKPD. Alat ini berguna untuk mengetahui program yang bersifat

lintas SKPD (berarti juga lintas sektoral) dan program yang unik hanya pada satu SKPD tertentu (Tabel 4.3).

Tabel di atas menunjukkan 10 program teratas yang bersifat lintas SKPD. Diantara ke-10 program tersebut, program yang terkait dengan paling banyak SKPD adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dipahami bahwa kesemua SKPD memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan program, maka diperlukan pengetahuan tentang peran SKPD dalam melaksanakan program sekaligus untuk mengatasi tumpang tindih program. Tabel 4.4 memuat tujuh SKPD yang memiliki keterkaitan paling tinggi dengan program yang disusun. Terkait tidaknya program dan SKPD tentunya dinilai dari muatan program yang dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

Tabel 4.3. Keterkaitan Program dengan SKPD

NO	KODE	PROGRAM	JUMLAH PROGRAM TERKAIT SKPD	JUMLAH PROGRAM TERKAIT SKPD TERDEPAN
1	I.A.1	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan	24	2
2	I.A.2	Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam.	14	4
3	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta	10	1
4	I.C.1	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yang mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam	9	3
5	II.A.1	Pelibatan masyarakat untuk memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis & agroindustri	9	3
6	II.A.4	Penerapan mitigasi bencana	9	1
7	I.C.2	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri)	8	3
8	II.E.2	Pengadaan fasilitas pemodal	8	1
9	III.B.2	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam	8	3
10	IV.A.1	Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum	8	2

Sumber : Hasil Analisis, 2008

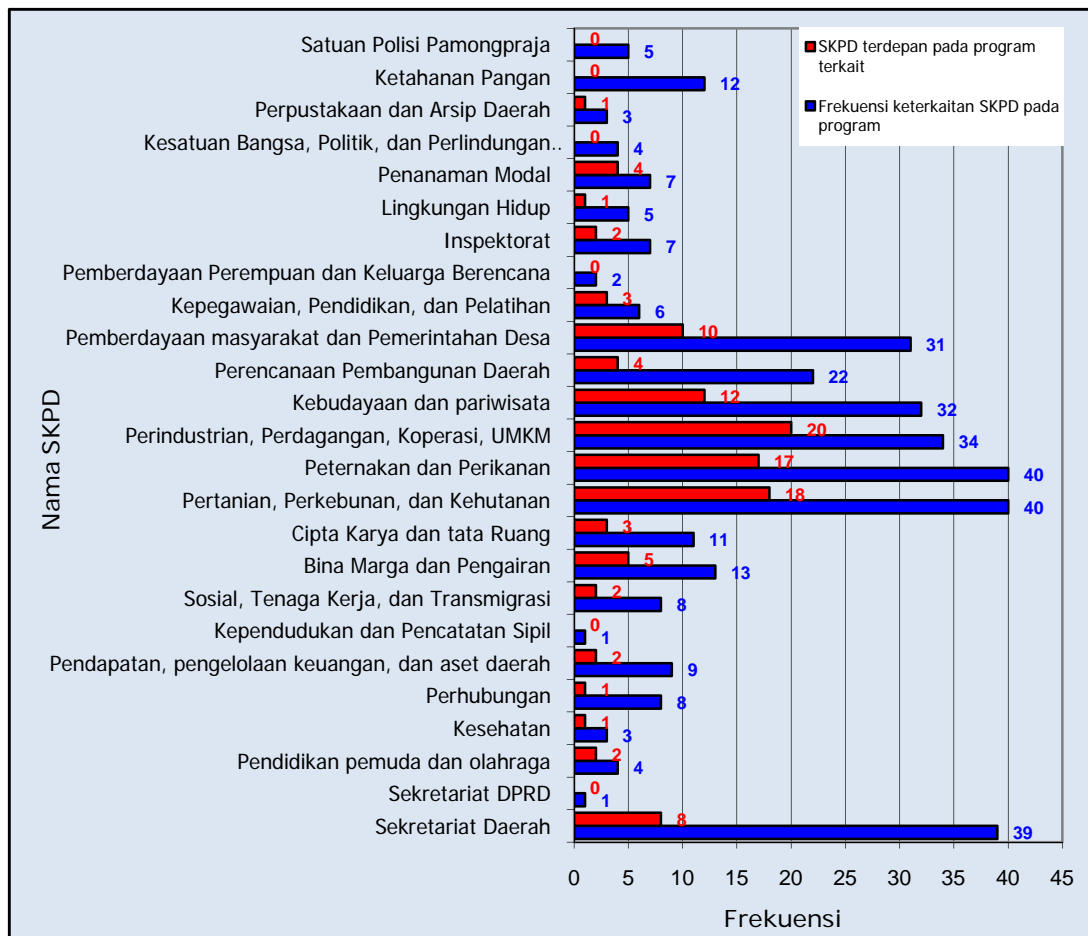


Tabel 4.4. Program terkait SKPD

NO	LEMBAGA TEKNIS TERKAIT	JUMLAH PROGRAM TERKAIT SKPD
1	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	40
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	40
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM	34
4	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	32
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22
7	Dinas Bina Marga dan Pengairan	13

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Sebagaimana dapat diamati, ketujuh SKPD dengan keterkaitan paling tinggi ini selaras dengan strategi yang dirumuskan. Adanya strategi yang menitikberatkan pada sektor agribisnis, agroindustri dan wisata alam memunculkan SKPD sektor pertanian dan pariwisata sebagai SKPD paling terkait. Adanya strategi untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memunculkan SKPD sektor UMKM.



Gambar 4.1. Keterkaitan program dan SKPD

Munculnya Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai dua diantara tujuh SKPD paling terkait dikarenakan perencanaan sebagai tupoksi Bappeda adalah hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sebuah program, sedangkan kemunculan Dinas Bina Marga dan Pengairan dikarenakan keseluruhan strategi membutuhkan dukungan infrastruktur agar dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Infrastruktur perhubungan dan pengairan tentunya menjadi syarat utama bagi berkembangnya industri berbasis pertanian dan pariwisata. Untuk keseluruhan SKPD dan tingkat keterkaitannya dengan program dapat dilihat pada Gambar 4.1 di atas.

## 4.7 Prioritas Sasaran dan Program

Seringkali dalam penentuan program menghadapi keterbatasan anggaran sehingga harus ada program yang dihilangkan, untuk mengatasi kesalahan pengambilan keputusan dalam memilih sebuah program, salah satu caranya adalah dengan menentukan tingkat kepentingan sebuah program melalui analisa hubungan keterkaitan antara sasaran dengan program. Alat analisa ini menjadi pelengkap dari alat analisa sebelumnya yaitu analisa kuadran kepentingan dan kemendesakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sasaran yang terkait dengan berbagai program sehingga bersifat 'kurang penting', namun ada juga sasaran yang hanya bisa diselesaikan oleh satu program sehingga bersifat 'sangat penting'. Semakin rendah keterkaitan maka semakin tinggi sifat kepentingannya dan sebaliknya, jumlah sasaran yang bernilai satu (1) yang artinya hanya bisa diselesaikan oleh satu program adalah 13 buah sasaran, sedangkan yang paling 'kurang penting' dengan nilai sasaran tertinggi 41 adalah sasaran 'Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan' artinya sasaran ini dikerjakan oleh 41 program, hasil selengkapnya lihat Tabel 4.5 di bawah. Data selengkapnya lihat Lampiran 8.

Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa sasaran yang dapat diselesaikan oleh banyak program adalah sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran ini dapat diselesaikan oleh 41 program sehingga jika

terdapat diantara ke-41 program tersebut yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran maka tidak akan mengganggu pencapaian sasaran mengingat pencapaiannya dapat dilaksanakan oleh program lain. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi sasaran dengan program terbanyak karena secara umum setiap bentuk pelaksanaan program adalah bentuk akuntabilitas (tanggung jawab) pemerintah sehingga setiap program dapat menyelesaikan sasaran ini.

Tabel 4.5. Tingkat kepentingan sasaran

NO	KODE	SASARAN	JUMLAH PROGRAM TERKAIT SASARAN
1	1.1.1.	Meningkatnya transparansi anggaran	1
2	1.1.2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	41
3	1.2.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7
4	1.2.2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan	9
5	1.2.3.	Mendorong pengembangan potensi lokal	26
6	1.2.4.	Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan	5
7	1.3.1.	Mewujudkan debirokratisasi pemerintahan	1
8	1.3.2.	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	12
9	1.3.3.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	1
10	2.1.1.	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan	1
11	2.1.2.	Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama	1
12	2.1.3.	Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong-royong sebagai implementasi dari ajaran agama	1
13	2.2.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal	2
14	2.2.2.	Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan	2
15	2.2.3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan	3
16	2.2.4.	Mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan	2
17	2.3.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	1
18	2.3.2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1
19	2.3.3.	Meningkatnya capaian indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan	1
20	2.3.4.	Mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesehatan	1
21	2.4.1.	Meningkatnya pendidikan dan keterampilan masyarakat	10
22	2.4.2.	Meningkatnya jiwa <i>entrepreneurship</i>	7
23	2.4.3.	Meningkatnya penguasaan IPTEK	3
24	2.4.4.	Meningkatnya etos kerja	5
25	3.1.1.	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	10
26	3.1.2.	Meningkatnya pemberdayaan petani	11
27	3.1.3.	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	10
28	3.1.4.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4
29	3.1.5.	Meningkatnya akses permodalan	4
30	3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan	10
31	3.2.2.	Meningkatnya pengembangan industri penunjang dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian	4
32	3.2.3.	Meningkatnya pengembangan potensi-potensi agrowisata yang berwawasan lingkungan	12
33	3.3.1.	Mengembangkan promosi dan pemasaran agribisnis	3
34	3.3.2.	Mengembangkan promosi dan pemasaran wisata alam	4
35	3.3.3.	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk UMKM	7
36	4.1.1.	Meningkatnya kepedulian semua pihak dalam melestarikan lingkungan	3
37	4.1.2.	Meningkatnya penegakan hukum pelestarian lingkungan	3
38	4.1.3.	Meningkatnya upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan	4

39	4.2.1.	Mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif	5
40	4.2.2.	Mewujudkan standard baku kualitas lingkungan (udara, air, darat)	2
41	4.2.3.	Meningkatnya manajemen mitigasi bencana alam	3
42	5.1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan	7
43	5.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengairan	3
44	5.1.3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan energi	4
45	5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana permukiman	1
46	5.2.1	Meningkatnya jaminan social pekerja	1
47	5.2.2	Meningkatnya jaminan ekonomi pekerja	1
48	6.1.1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa	5
49	6.1.2.	Mewujudkan implementasi otonomi desa	8
50	6.2.1.	Meningkatnya kualitas demokratisasi dan ketahanan masyarakat desa	5
51	6.2.2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	10
52	6.2.3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa	9

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Terdapat 13 sasaran yang hanya dapat diselesaikan oleh satu program sehingga tanpa pelaksanaan program tersebut maka sasaran tidak akan tercapai. Diantara ke-13 sasaran tersebut adalah meningkatnya transparansi anggaran, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, dan meningkatkan jaminan sosial dan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja. Dapat diamati bahwa sasaran-sasaran tersebut bersifat unik sehingga membutuhkan program khusus untuk mencapainya.

## 4.8 Kepentingan dan Kemendesakan

Dalam pelaksanaan program diperlukan pengetahuan tentang kepentingan dan kemendesakan setiap program dengan tujuan utamanya adalah penapisan sehingga dapat diketahui program mana yang harus didahulukan pelaksanaannya dan mana yang menyusul. Untuk itu dilakukan analisa keterkaitan dan analisa kuadran.

### 4.8.1 Analisa Keterkaitan

Untuk memudahkan melakukan prioritas dan penganggaran maka perlu dilakukan pembobotan yang terurut, mulai dari pembobotan misi, tujuan, strategi, dan program. Hasil pembobotan misi terhadap isu strategis, tujuan terhadap sasaran, dan strategi terhadap tujuan.

Analisa keterkaitan antara isu strategis dan misi dilakukan sehingga dapat diketahui tingkatan masing-masing misi dalam menyelesaikan isu strategis. Melalui analisa ini dapat diukur mandat yang diemban oleh setiap misi. Hasil analisa keterkaitan menunjukkan bahwa dari enam (6) misi

menunjukkan tingkat keterkaitan tertinggi pada misi kedua (37 isu), kemudian misi ketiga (30 buah), misi pertama dan misi keempat (18 isu), misi keenam (16 isu), terakhir misi kelima (15 isu). Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Bobot nilai dan persentase misi terhadap isu strategis

NO	MISI	BOBOT	
		NILAI	(%)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-publik	18	13,43
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing	37	27,61
3	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agribisnis dan agrowisata dalam upaya pengentasan kemiskinan	30	22,39
4	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan	18	13,43
5	Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	15	11,19
6	Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	16	11,94
	JUMLAH	134	100

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Berdasarkan pada Tabel 4.6 diketahui bahwa misi peningkatan kualitas SDM adalah misi yang paling banyak terkait dengan isu strategis. Dapat pula dikatakan bahwa misi ini adalah misi dengan mandat yang paling kuat. Hal ini selaras dengan program peningkatan kapasitas SDM yang pada bagian terdahulu digolongkan sebagai program yang sangat penting dan sangat mendesak. Salah satu hal yang menyebabkan misi ini menjadi misi yang paling terkait dengan isu strategis adalah adanya permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di era *bottom-up planning and development*, rendahnya partisipasi masyarakat tentunya menjadi permasalahan strategis.

Misi yang memiliki keterkaitan paling rendah dengan isu strategis adalah misi peningkatan kualitas derajat kehidupan masyarakat. Misi ini memiliki keterkaitan yang paling menonjol dengan isu kurangnya peran serta swasta dan BUMN dalam pembangunan. Selengkapnya lihat Lampiran 9 dan Lampiran 10.

Tujuan terhadap sasaran juga dibobotkan berdasarkan tingkat kontribusi tujuan terhadap pelaksanaan misi. Hasilnya menunjukkan bahwa

bobot terbesar pada tujuan 'Mencapai sumber daya manusia yang cerdas'. Lihat Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Nilai bobot tujuan terhadap sasaran

NO	TUJUAN	BOBOT	
		NILA I	(%)
1.1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah	2	1,49
1.2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional	10	7,46
1.3	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan ekonomis	6	4,48
2.1	Mencapai sumber daya manusia yang berakhlak mulia	6	4,48
2.2	Mencapai sumber daya manusia yang cerdas	15	11,19
2.3	Mencapai sumber daya manusia yang sehat	4	2,99
2.4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing	12	8,96
3.1	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	11	8,21
3.2	Mengembangkan pengembangan sektor agribisnis dan agrowisata	13	9,70
3.3	Mengembangkan promosi dan pemasaran pada sektor agribisnis dan wisata alam	6	4,48
4.1	Memelihara kelestarian lingkungan	8	5,97
4.2	Mengembangkan keseimbangan lingkungan dalam pemanfaatannya	10	7,46
5.1	Mewujudkan peningkatan infrastruktur wilayah	12	8,96
5.2	Mewujudkan jaminan kerja dan berusaha	3	2,24
6.1	Mewujudkan penguatan kapasitas pemerintahan desa	6	4,48
6.2	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa	10	7,46
	JUMLAH	134	100

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Pembobotan selanjutnya adalah pembobotan strategi terhadap tujuan. Dasar dari pembobotan ini adalah tingkat kontribusi strategi terhadap pencapaian tujuan. Dari kelima strategi, penataan SDM aparatur dan masyarakat adalah strategi dengan bobot tertinggi, artinya memberikan kontribusi paling banyak terhadap terwujudnya tujuan (Tabel 4.8). Perhitungan nilai bobot tujuan terhadap strategi dapat dilihat pada Lampiran 11.

Pembobotan terakhir adalah pembobotan program terhadap strategi. dari pembobotan inilah didapat besaran alokasi anggaran untuk setiap program. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Bobot program yang menentukan besaran alokasi anggaran adalah untuk setiap strategi. Untuk strategi (1), program dengan alokasi anggaran terbesar adalah pengadaan utilitas (listrik, air, komunikasi) dengan alokasi sebesar 15,38%, untuk strategi (2) adalah program pendampingan untuk menjaga berjalannya program dengan alokasi sebesar 16,07%, strategi (3) adalah program membangun atau memperbaiki sarana & prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam dengan alokasi sebesar 18,90%, strategi (4) adalah program peningkatan kemandirian desa dalam pengembangan UKM & koperasi dan program peningkatan akses transportasi dengan alokasi sebesar 21.33%, dan strategi (5) adalah program peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat desa dan masyarakat dengan alokasi sebesar 21.71%.

Tabel 4.8. Nilai bobot strategi terhadap tujuan

NO	STRATEGI	BOBOT (%)
1	Penataan SDM mencakup sumber daya aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan berdaya saing;	26,28
2	Menjadikan Bandung Barat sebagai kabupaten agro industri;	24,91
3	Menjadikan Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan;	24,91
4	Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan kesadaran berkoperasi;	14,33
5	Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa.	9,56

Sumber : Hasil Analisis, 2008

#### 4.8.2 Analisa Kuadran

Analisa kuadran digunakan untuk menapis program berdasarkan skala kepentingan dan kemendesakannya. Terdapat empat kuadran meliputi (1) kuadran sangat penting dan sangat mendesak; (2) sangat penting dan kurang mendesak; (3) kurang penting dan sangat mendesak; serta (4) kurang penting dan kurang mendesak. Lihat Gambar 4.2. Hasil

Q2 (sangat penting dan kurang mendesak)	Q1 (sangat penting dan sangat mendesak)
Q3 (kurang penting dan sangat mendesak)	Q4 (kurang penting dan kurang mendesak)

dari analisa kuadran dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Gambar 4.2. Kuadran kepentingan dan kemendesakan

Tabel 4.9. Penentuan program berdasarkan kepentingan dan kemendesakan

NO	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV
	ANGGARAN BESAR DAN TAHUN (I + II)	ANGGARAN BESAR DAN TAHUN (III, IV,V)	ANGGARAN RENDAH DAN TAHUN (I + II)	ANGGARAN RENDAH DAN TAHUN (III, IV,V)
1	I.D.1	I.A.1	I.C.1	I.D.4
2	I.D.2	I.A.2	I.C.2	I.D.5
3	I.D.6	I.A.3	I.C.3	I.E.1
4	I.D.7	I.A.4	I.C.4	I.E.2
5	I.D.8	I.B.1	I.C.5	II.D.6
6	II.A.2	I.D.3	I.C.6	II.F.2
7	II.A.3	II.A.1	II.F.3	IV.A.3
8	II.C.1	II.A.4	II.G.1	IV.A.5
9	II.C.2	II.B.1	III.A.1	IV.B.3
10	II.D.4	II.D.1	III.A.2	
11	II.E.1	II.D.2	III.B.3	
12	II.F.1	II.D.3	III.C.1	
13	III.B.1	II.D.5	III.C.2	
14	III.B.2	II.E.2	III.C.3	
15	III.D.1	II.E.3	III.D.2	
16	III.D.3	II.E.4	IV.A.1	
17	III.D.4	III.E.2	IV.A.2	
18	III.E.1	IV.C.1	IV.A.4	
19	IV.B.2	V.A.4	IV.B.1	
20	IV.C.3		IV.C.2	
21	V.A.1		V.A.5	
22	V.A.2		V.A.6	
23	V.A.3		V.A.8	
24	V.A.7		V.A.9	

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Terdapat program-program yang sangat mendesak sehingga harus didahulukan pelaksanaannya dibandingkan program lainnya. Program yang sangat mendesak ini dilaksanakan sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

Program yang sangat mendesak ini berasal dari keseluruhan strategi, artinya adalah strategi yang telah disusun merupakan strategi yang memang menjadi kebutuhan. Tetapi program yang sangat mendesak ini dapat dibedakan kembali berdasarkan tingkat kepentingannya: sangat penting dan



kurang penting. Program-program yang sangat mendesak dan sangat penting ini diantaranya adalah program-program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat. Terdapat juga program pengkajian karena kabupaten baru ini membutuhkan basis data dasar bagi segala proses pengambilan keputusan nantinya. Program yang sangat mendesak dan kurang penting diantaranya adalah pengadaan beasiswa pendidikan, pemanfaatan lahan tidur, dan pengembangan kerjasama antara pemerintahan daerah dengan pihak lain seperti swasta dan Perhutani.

Di luar program yang sangat mendesak ini terdapat program yang kurang mendesak dengan skala kepentingannya sangat penting dan kurang penting. Program yang kurang mendesak tetapi sangat penting diantaranya adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan pemekaran wilayah (kecamatan) sedangkan program yang kurang mendesak dan kurang penting diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan penyediaan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program-program yang kurang mendesak ini mulai dilaksanakan pada tahun ketiga RPJMD.

## 4.9 Urusan Wajib, Pilihan, dan Bidang

Program-program yang ada untuk selanjutnya ditapis kembali berdasarkan urusan wajib pemerintah dan urusan pilihan. Urusan wajib berjumlah 74 buah, urusan pilihan 35 buah, dengan pembagian pada bidang fisik 14 buah, bidang sosial dan pemerintahan 23 buah, serta bidang ekonomi 54 buah. Selengkapnya lihat Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hubungan antara urusan Wajib, Pilihan, dan Bidang

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	URUSAN		BIDANG		
			WAJIB	PILIHAN	FISIK	SOSIAL	EKONOMI
<b>I. Strategi : Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat</b>							
<b>Program</b>							
1	I.A.1	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	0	0	1	1
2	I.A.2	Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam	0	1	0	0	1
3	I.A.3	Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan anggaran secara transparan	1	0	0	1	0

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	URUSAN		BIDANG		
			WAJIB	PILIHAN	FISIK	SOSIAL	EKONOMI
4	I.A.4	Pengawasan dan penegakan hukum atas praktek-praktek korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih	1	0	0	1	0
5	I.B.1	Pemekaran wilayah	1	0	0	1	0
6	I.C.1	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yg mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam	0	1	0	0	1
7	I.C.2	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri)	0	1	0	0	1
8	I.C.3	Peningkatan minat, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam	0	1	0	0	1
9	I.C.4	Sosialisasi untuk pengembangan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri) dan pengelolaan wisata alam	0	1	0	0	1
10	I.C.5	Peningkatan keswadayaan masyarakat	1	0	0	1	1
11	I.C.6	Pengadaan beasiswa pendidikan	1	0	0	1	0
12	I.D.1	Peningkatan sarpras kesehatan khususnya di wilayah perdesaan	1	0	0	1	0
13	I.D.2	Peningkatan sarpras pendidikan dari tingkat SLTP-PT di kecamatan (dan akses transportasinya)	1	0	1	1	0
14	I.D.3	Mendirikan perpustakaan desa	1	0	0	1	0
15	I.D.4	Peningkatan sarana prasarana keagamaan	1	0	1	1	0
16	I.D.5	Peningkatan sarana prasarana pemukiman	1	0	1	0	0
17	I.D.6	Pembangunan sarana prasarana pemerintahan	1	0	1	0	0
18	I.D.7	Pengadaan utilitas (telepon, listrik, air bersih)	1	1	1	0	0
19	I.D.8	Infrastruktur skala kabupaten	1	0	1	0	0
20	I.E.1	Penyediaan jaminan sosial bagi golongan pekerja	1	0	0	1	0
21	I.E.2	Penyediaan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja	1	0	0	0	1
<b>II Strategi : Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri</b>							
<b>Program</b>							
19	II.A.1	Pelibatan masyarakat untuk memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis & agroindustri	0	1	0	0	1
20	II.A.2	Penguatan kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam	0	1	0	0	1
21	II.A.3	Peningkatan kapasitas SDM petani dengan penyebar luasan penerapan teknologi	0	1	0	0	1
22	II.A.4	Penerapan mitigasi bencana	1	0	1	0	0
23	II.B	Pendampingan untuk menjaga berjalannya program	1	0	0	0	1
24	II.C.1	Fasilitasi penempatan PPL/desa	0	1	0	0	1
25	II.C.2	Peningkatan kemampuan & sarana penyuluhan	0	1	0	0	1
26	II.D.1	Penyediaan alat-alat pertanian, pupuk pertanian	0	1	0	0	1
27	II.D.2	Peningkatan budidaya pasca panen	0	1	0	0	1
28	II.D.3	Penerapan teknologi tepat guna	1	1	0	0	1
29	II.D.4	Perbaikan & perluasan infrastruktur pendukung pertanian	1	1	1	0	1
30	II.D.5	Pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian	0	1	0	0	1
31	II.D.6	Pembangunan fasilitasi pengembangan	1	0	0	0	1

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	URUSAN		BIDANG		
			WAJIB	PILIHAN	FISIK	SOSIAL	EKONOMI
		infrastruktur untuk pengembangan agroindustri skala besar					
32	II.E.1	Pembentukan koperasi	1	0	0	0	1
33	II.E.2	Pengadaan fasilitasi pemodal	1	0	0	0	1
34	II.E.3	Pengembangan usaha/jasa untuk peningkatan nilai tambah petani	0	1	0	0	1
35	II.E.4	Pengembangan pemasaran	0	1	0	0	1
36	II.F.1	Pencegahan konversi lahan	0	1	1	0	1
37	II.F.2	Pencetakan lahan pertanian baru	0	1	1	0	1
38	II.F.3	Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas produktif	0	1	1	0	1
39	II.G.1	Pengenalan potensi daerah melalui website	1	0	0	1	1
<b>III. Strategi : Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan</b>							
<b>Program</b>							
40	III.A.1	Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat di obyek wisata	0	1	0	0	1
41	III.A.2	Peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM aparat dalam bidang kepariwisataan	0	1	0	1	1
42	III.B.1	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pengelolaan obyek-obyek wisata	1	1	0	0	1
43	III.B.2	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam	1	0	1	0	1
44	III.B.3	Pengembangan program penghijauan	0	1	0	0	1
45	III.C.1	Pencarian dukungan dari pemerintah	1	0	0	0	1
46	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta	1	0	0	0	1
47	III.C.3	Pengembangan kerjasama dengan Perhutani	1	0	0	0	1
48	III.D.1	Pengaturan pengelolaan wisata	0	1	0	0	1
49	III.D.2	Penerapan keterpaduan SKPD	0	1	0	0	1
50	III.D.3	Penerapan legalitas kepariwisataan	1	1	0	1	1
51	III.D.4	Peningkatan dukungan politik dalam pengembangan wisata alam	1	1	0	1	1
52	III.E.1	Pengkajian	0	1	0	0	1
53	III.E.2	Promosi	0	1	0	0	1
<b>IV Strategi : Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi</b>							
<b>Program</b>							
54	IV.A.1	Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum	1	0	0	1	1
55	IV.A.2	Penyediaan layanan koperasi syariah	1	0	0	0	1
56	IV.A.3	Pembuatan perizinan satu atap	1	0	0	0	1
57	IV.A.4	Peningkatan akses permodalan	1	0	0	0	1
58	IV.A.5	Pembuatan baseline UKM-koperasi	1	0	0	0	1
59	IV.B.1	Peningkatan kualitas SDM	1	0	0	0	1
60	IV.B.2	Peningkatan kemandirian desa dlm pengembangan UKM & koperasi	1	0	0	0	1
61	IV.B.3	Pembentukan forum koordinasi UKM-koperasi	1	0	0	0	1
62	IV.C.1	Pembentukan sentra produk unggulan UKM	1	0	0	0	1
63	IV.C.2	Peningkatan akses pasar	1	0	0	0	1
64	IV.C.3	Peningkatan akses transportasi	1	0	1	0	0
<b>V Strategi : Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa</b>							
<b>Program</b>							
65	V.A.1	Peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat	1	0	0	1	0

NO	KODE	STRATEGI DAN PROGRAM	URUSAN		BIDANG		
			WAJIB	PILIHAN	FISIK	SOSIAL	EKONOMI
		desa dan masyarakat					
66	V.A.2	Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat	1	0	0	1	0
67	V.A.3	Pelaksanaan program oleh pemerintah harus mengacu pada penguatan otonomi desa	1	0	0	1	0
68	V.B.1	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung desa dikelola oleh lembaga masyarakat desa	0	1	1	1	0
69	V.B.2	Peningkatan dan pelestarian budaya gotong royong	0	1	0	1	0
70	V.B.3	Pejabat desa dan pemerintah (RT, RW, kepala desa, dan camat) memberikan contoh nyata oleh dalam bergotong royong	0	1	0	1	0
71	V.B.4	Peningkatan perekonomian desa	1	0	0	0	1
72	V.B.5	Pemberian akses permodalan pertanian	0	1	0	0	1
73	V.B.6	Pembuatan perdes pembangunan desa	1	0	0	1	0
	.	<b>Jumlah Urusan dan Bidang</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>54</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Urusan yang mendominasi keseluruhan program adalah urusan wajib karena program tersebut terkait dengan pelayanan dasar. Program-program yang menjadi urusan wajib diantaranya adalah pengawasan dan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Terdapat pula program yang menjadi urusan pilihan. Program seperti ini adalah program yang dapat memberikan keunikan pada daerah karena urusan pilihan berbeda antar daerah. Secara umum program yang menjadi urusan pilihan adalah program-program terkait pengembangan agribisnis, agroindustri, dan wisata alam. Hal inilah yang dapat menjadi penciri Kabupaten Bandung Barat sekaligus kreativitas dalam mengelola potensi sumber daya lokal.

#### 4.10 Waktu Pelaksanaan Program

Program-program yang telah tersusun ditapis kembali berdasarkan waktu pelaksanaannya. Perlu dicermati bahwa meskipun waktu pelaksanaan telah dihasilkan melalui analisa kuadran kepentingan dan kemendesakan, tetapi itu sifatnya indikatif dan menjadi salah satu variabel dalam penentuan waktu pelaksanaan program ini.

Terdapat variabel lain untuk menentukan secara lebih presisi waktu pelaksanaan program yaitu (i) variabel hasil perencanaan internal Bappeda mengenai jadwal pelaksanaan program, dan (ii) variabel penyesuaian yang dilaksanakan oleh tim penyusun dengan mempertimbangkan diantaranya ketersediaan anggaran. Ketiga variabel ini dipertimbangkan dan diramu sedemikian rupa sehingga didapat jadwal waktu pelaksanaan program secara lebih presisi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Jadwal waktu pelaksanaan program

NO	KODE	PROGRAM	TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
<b>I. Strategi :</b>								
<b>Penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat</b>								
1	I.A.1	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan	.	.	1	1	1	1
2	I.A.2	Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam	.	.	1	1	1	1
3	I.A.3	Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan anggaran secara transparan	.	.	1	1	1	1
4	I.A.4	Pengawasan dan penegakan hukum atas praktek-praktek korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih	.	.	1	1	1	1
5	I.B.1	Pemekaran wilayah	.	.	.	1	.	.
6	I.C.1	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yg mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam	1	1	.	.	.	.
7	I.C.2	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri)	1	1	.	.	.	.
8	I.C.3	Peningkatan minat, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam	1	1	.	.	.	.
9	I.C.4	Sosialisasi untuk pengembangan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agribisnis dan agroindustri) dan pengelolaan wisata alam	1	1	.	.	.	.
10	I.C.5	Peningkatan keswadayaan masyarakat	1	1	.	.	.	.
11	I.C.6	Pengadaan beasiswa pendidikan	1	1	.	.	.	.
12	I.D.1	Peningkatan sarpras kesehatan khususnya di wilayah perdesaan	1	1	.	.	.	.
13	I.D.2	Peningkatan sarpras pendidikan dari tingkat SLTP-PT di kecamatan (dan akses transportasinya)	1	1	.	.	.	.
14	I.D.3	Mendirikan perpustakaan desa	.	.	1	1	.	.
15	I.D.4	Peningkatan sarana prasarana keagamaan	.	.	1	.	.	.
16	I.D.5	Peningkatan sarana prasarana pemukiman	.	.	.	1	1	.

NO	KODE	PROGRAM	TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
17	I.D.6	Pembangunan sarana prasarana pemerintahan	1	1	1	1	.	.
18	I.D.7	Pengadaan utilitas (telepon, listrik, air bersih)	1	1	.	.	.	.
19	I.D.8	Infrastruktur skala kabupaten	1	1	.	.	.	.
20	I.E.1	Penyediaan jaminan sosial bagi golongan pekerja	.	.	.	1	.	.
21	I.E.2	Penyediaan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja	.	.	.	1	.	.
<b>II. Strategi :</b>								
<b>Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri</b>								
22	II.A.1	Pelibatan masyarakat untuk memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis & agroindustri	.	.	1	1	1	1
23	II.A.2	Penguatan kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam	1	1	.	.	.	.
24	II.A.3	Peningkatan kapasitas SDM petani dengan penyebar luasan penerapan teknologi	1	1	1	.	.	.
25	II.A.4	Penerapan mitigasi bencana	.	.	1	1	1	1
26	II.B	Pendampingan untuk menjaga berjalannya program	.	.	1	1	1	1
27	II.C.1	Fasilitasi penempatan PPL/desa	1	1	.	.	.	.
28	II.C.2	Peningkatan kemampuan & sarana penyuluhan	1	1	.	.	.	.
29	II.D.1	Penyediaan alat-alat pertanian, pupuk pertanian	.	.	1	1	1	.
30	II.D.2	Peningkatan budidaya pasca panen	.	.	1	1	.	.
31	II.D.3	Penerapan teknologi tepat guna	.	.	1	1	.	.
32	II.D.4	Perbaikan & perluasan infrastruktur pendukung pertanian	1	1	1	.	.	.
33	II.D.5	Pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian	.	.	.	1	1	.
34	II.D.6	Pembangunan fasilitas pengembangan infrastruktur untuk pengembangan agroindustri skala besar	.	.	.	.	1	1
35	II.E.1	Pembentukan koperasi	1	1	.	.	.	.
36	II.E.2	Pengadaan fasilitas pemodal	1	1	1	1	1	1
37	II.E.3	Pengembangan usaha/jasa untuk peningkatan nilai tambah petani	.	.	.	1	1	.
38	II.E.4	Pengembangan pemasaran	.	.	1	1	1	.
39	II.F.1	Pencegahan konversi lahan	1	1	1	1	1	1
40	II.F.2	Pencetakan lahan pertanian baru	1	1	1	.	.	.
41	II.F.3	Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas produktif	1	1	1	1	1	1
42	II.G.1	Pengenalan potensi daerah melalui website	.	1	.	.	.	.
<b>III. Strategi :</b>								
<b>Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan</b>								
43	III.A.1	Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat di obyek wisata	1	1	1	.	.	.
44	III.A.2	Peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM aparat dalam bidang kepariwisataan	1	1	.	.	.	.
45	III.B.1	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pengelolaan obyek-obyek wisata	1	1	.	.	.	.
46	III.B.2	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam	1	1	.	.	.	.
47	III.B.3	Pengembangan program penghijauan	1	1	1	1	1	1

NO	KODE	PROGRAM	TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
48	III.C.1	Pencarian dukungan dari pemerintah	1	1	.	.	.	.
49	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta	1	1	.	.	.	.
50	III.C.3	Pengembangan kerjasama dengan Perhutani	1	1	.	.	.	.
51	III.D.1	Pengaturan pengelolaan wisata	1	1	.	.	.	.
52	III.D.2	Penerapan keterpaduan SKPD	1	1	1	1	1	1
53	III.D.3	Penerapan legalitas kepariwisataan	1	1	.	.	.	.
54	III.D.4	Peningkatan dukungan politik dalam pengembangan wisata alam	1	1	.	.	.	.
55	III.E.1	Pengkajian	1	1	.	.	.	.
56	III.E.2	Promosi	.	.	1	1	.	.
<b>IV. Strategi :</b>								
<b>Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi</b>								
57	IV.A.1	Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum	1	1	.	.	.	.
58	IV.A.2	Penyediaan layanan koperasi syariah	1	1	.	.	.	.
59	IV.A.3	Pembuatan perizinan satu atap	.	.	1	.	.	.
60	IV.A.4	Peningkatan akses permodalan	1	1	1	.	.	.
61	IV.A.5	Pembuatan baseline UKM-koperasi	.	.	1	.	.	.
62	IV.B.1	Peningkatan kualitas SDM	1	1	1	.	.	.
63	IV.B.2	Peningkatan kemandirian desa dlm pengembangan UKM & koperasi	1	1	.	.	.	.
64	IV.B.3	Pembentukan forum koordinasi UKM-koperasi	.	.	1	.	.	.
65	IV.C.1	Pembentukan sentra produk unggulan UKM	.	.	1	1	.	.
66	IV.C.2	Peningkatan akses pasar	1	1	1	.	.	.
67	IV.C.3	Peningkatan akses transportasi	1	1	.	.	.	.
<b>V. Strategi :</b>								
<b>Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa</b>								
68	V.A.1	Peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat desa dan masyarakat	1	1	.	.	.	.
69	V.A.2	Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat	1	1	.	.	.	.
70	V.A.3	Pelaksanaan program oleh pemerintah harus mengacu pada penguatan otonomi desa	1	1	1	1	1	1
71	V.B.1	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung desa dikelola oleh lembaga masyarakat desa	.	.	1	1	.	.
72	V.B.2	Peningkatan dan pelestarian budaya gotong royong	1	1	1	1	1	1
73	V.B.3	Pejabat desa dan pemerintah (RT, RW, kepala desa, dan camat) memberikan contoh nyata oleh dalam bergotong royong	1	1	1	1	1	1
74	V.B.4	Peningkatan perekonomian desa	1	1	.	.	.	.
75	V.B.5	Pemberian akses permodalan pertanian	1	1	1	.	.	.
76	V.B.6	Pembuatan perdes pembangunan desa	.	1	.	.	.	.

Sumber : Hasil Analisis, 2008

## 4.11 Lokasi Program

### 4.11.1 Penentuan Lokasi

Untuk mencapai visi yang dapat terukur, maka dalam pertemuan SKPD telah ditentukan lokasi strategis dalam lima (5) tahun ke depan yang harus memenuhi kriteria keterpaduan antara kegiatan wisata ramah lingkungan dan agribisnis (lihat Tabel 4.12), hasilnya adalah :

- KBB bagian utara (Lembang, Parongpong, dan Cisarua) memiliki skor tertinggi karena sudah jauh berkembang dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga kegiatan yang akan dilakukan di KBB bagian utara adalah pengendalian terhadap alih fungsi lahan dan peningkatan akses masyarakat terhadap sektor agribisnis dan wisata alam;
- KBB bagian barat yaitu Cipeundeuy, Cipatat, dan Cikalong Wetan memiliki skor potensi ke dua, kemudian di KBB bagian tengah yaitu Padalarang (Ciburuy) yang diposisikan sebagai 'etalase' bagi Kabupaten Bandung Barat karena berada di jalur utama transportasi;
- KBB bagian selatan memiliki skor potensi terendah yaitu Cililin, Rongga, Gununghalu, dan Sindangkerta.

Keadaan tersebut mengarahkan lokasi strategis pelaksanaan program di enam lokasi terpilih yaitu, di Kabupaten Bandung Barat bagian barat (Cipeundeuy dan Cipatat), dan KBB bagian selatan (Cililin, Rongga, Gunung Halu, dan Sindangkerta). Jika terjadi keterbatasan anggaran maka untuk Gunung Halu dan Sindangkerta akan dipilih salah satu karena memiliki karakteristik yang sama.

Tabel 4.12. Skor lokasi yang memiliki potensi pengembangan agribisnis dan wisata ramah lingkungan.

KAB BB	KECAMATAN	HUTAN	DANAU	CURUG	SAYURAN	TNM. HIAS	SAPI PERAH	JAGUNG	PERIKANAN	JUMLAH
Utara	Lembang	1	1	0	1	1	1	0	0	5
	Cisarua	1	0	1	1	1	1	0	0	5
	Parongpong	1	0	1	1	1	1	0	0	5
Barat	Cipeundeuy	0	1	0	0	0	0	1	1	3



	<b>Cipatat</b>	0	1	1	0	0	0	1	0	3
<b>Selatan</b>	<b>Cililin</b>	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	<b>Rongga</b>	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	<b>Gununghalu</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>Sindangkerta</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>		6	3	4	3	3	3	2	2	26

Sumber: Hasil kelompok diskusi terfokus dengan SKPD

#### 4.11.2 Analisa Lokasi

Apabila dilakukan kajian berbasis analisa kuantitatif untuk masing-masing lokasi maka terdapat pilihan-pilihan lokasi strategis termasuk pola keterkaitannya yang harus diperhatikan untuk mendorong pengembangan keenam kecamatan tersebut.

Pertama di bagian utara, Kecamatan Lembang memiliki posisi sektor pertanian yang sangat kuat dan mampu mendorong perkembangan perekonomian wilayah. Hal tersebut didasarkan atas dominannya persentase PDRB sektor pertanian dan diikuti dengan besaran Total PDRB di atas rata-rata PDRB dari seluruh Kecamatan di Bandung Barat. Basis komoditas yang dominan berkembang adalah tanaman pangan mencakup hortikultura, sedangkan peternakan antara lain adalah peternakan sapi. Satu hal yang menarik, aktivitas pertanian di Lembang juga diikuti dengan berkembangnya aktivitas perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Lembang memiliki akses yang tinggi terhadap pasar sehingga dapat dijadikan *outlet* untuk produk-produk pertanian. Sayangnya perkembangan sektor pertanian di Lembang bersifat padat modal atau penyerapan tenaga kerja bidang pertaniannya relatif kecil.

Sementara di Kecamatan Cisarua dan Parongpong aktivitas pertaniannya cukup dominan dan mampu menyerap tenaga kerja. Namun demikian aktivitas ekonomi pertanian di kedua kecamatan tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong perkembangan perekonomian wilayah (pembentukan PDRB total). Karena itu harus dibangun keterkaitan agar pengembangan agribisnis, agrowisata, ekowisata, dan wisata bunga di Kecamatan Parongpong dan Cisarua dapat mengisi peluang pasar di kecamatan Lembang.

Dengan demikian hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap aktivitas agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang dalam hal ini lebih terkait dengan pengepakan, termasuk wisata alam (berbasis alam dan pertanian). Sementara di lembang sendiri aktivitas sektor pertanian dengan potensi pasar yang besar ini harus dipertahankan dimana salah satu upaya yang terpenting adalah menghentikan terjadinya alih fungsi lahan. Karena itu akan sangat tepat apabila Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong dijadikan lokasi strategis untuk pengembangan pertanian terutama pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, agrowisata, ekowisata, dan wisata bunga.

Selanjutnya, untuk wilayah bagian barat, Kecamatan Cipatat merupakan kecamatan dengan aktivitas sektor pertanian yang mampu mendorong perkembangan perekonomian wilayah (PDRB Total). Hal tersebut didasarkan atas dominannya persentase PDRB sektor pertanian dan diikuti dengan besaran Total PDRB di atas rata-rata PDRB dari seluruh Kecamatan di Bandung Barat. Basis komoditas yang berkembang adalah tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.

Seperti Kecamatan Lembang, di Cipatat mulai berkembang aktivitas sektor perdagangan meskipun belum signifikan. Namun aktivitas pertanian di Cipatat ternyata juga bersifat padat modal sehingga kurang mampu meningkatkan serapan tenaga kerja. Sementara di Cipeundeuy, sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan muncul sebagai sektor yang relatif tinggi tetapi ketiganya memiliki serapan tenaga kerja pertanian yang rendah. Hal ini karena sebagian besar penduduk di Cipeundeuy bekerja di sektor perdagangan, itu terbentur dengan kendala SDM yang masih rendah serta daya beli masyarakat yang masih rendah pula. Hal ini berarti perdagangan yang berkembang adalah perdagangan skala kecil. Kemungkinan besar outletnya adalah untuk di wilayah Kecamatan Cipatat ataupun Padalarang.

Seperti diketahui Kecamatan Cipatat atau Padalarang dikelilingi oleh 3 kecamatan yang berbasis industri dengan tingkat produksi dan daya beli masyarakat yang tinggi yaitu Padalarang, Batujajar dan Ngamprah. Sementara

Cipatat sendiri meskipun berbasis pertanian tetapi didominasi oleh tenaga kerja perdagangan dengan daya beli masyarakatnya yang juga tinggi. Dengan potensi permintaan yang tinggi maka arahan pengembangan pertanian di Cipatat akan berbasis kepada komoditas pangan, perkebunan, dan perikanan, sedangkan di Cipeundeuy akan berbasis kepada sektor perkebunan, dan perikanan meskipun kedua sektor tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kecamatan Cipeundeuy sendiri.

Di Cipeundeuy sendiri juga bisa dikembangkan aktivitas sektor wisata sebagai komplemen bagi pengembangan sektor perikanan di waduk Cirata. Di Kecamatan Cipeundeuy kehutanan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan karena ada kawasan waduk Cirata. Namun karena banyak aktivitas pertanian di kedua kecamatan ini kurang memberikan dampak bagi serapan tenaga kerja, maka pengembangan aktivitas industri berbasis agro dapat dilakukan di Padalarang, Batujajar dan Ngamprah sehingga dapat menangkap produk dari Cipatat dan Cipeundeuy untuk kemudian mendorong akumulasi nilai tambah dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Saat ini karena berkembangnya sektor perdagangan di Padalarang, Batujajar, Ngamprah dan Cipatat mengakibatkan berbagai produk langsung keluar dari wilayah ini tanpa sempat terbangun suatu kaitan antara aktivitas ekonomi di kawasan ini. Khusus untuk Kecamatan Cipeundeuy sendiri produk-produk pertanian yang dihasilkan dapat pula mengalir ke luar wilayah yaitu ke Purwakarta.

Sementara untuk wilayah bagian selatan, Kecamatan Cililin dapat menjadi sentra bagi kecamatan-kecamatan lain yang berada di wilayah bagian selatan, meskipun secara perekonomian wilayah kecamatan ini memiliki PDRB total yang relatif rendah. Akan tetapi Kecamatan Cililin ini memiliki sektor perdagangan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja sektor perdagangan yang juga tinggi.

Terakhir, Kecamatan Sindangkerta memiliki potensi tenaga kerja perdagangan dan tenaga kerja pertanian yang cukup tinggi, dimana tenaga kerja pertanian ini banyak mengisi sektor pertanian pangan dan kehutanan. Sementara di Gununghalu dan Rongga memiliki tenaga kerja pertanian yang

banyak terutama berada di sektor perkebunan dan kehutanan. Namun demikian sektor pangan, perkebunan dan kehutanan di Kecamatan Sindangkerta, Rongga dan Gununghalu belum dapat mendorong PDRB ketiga kecamatan ini memiliki nilai yang tinggi. Dengan demikian diharapkan Cililin dapat menjadi outlet untuk produk pangan, perkebunan dan kehutanan dari ketiga kecamatan yang menjadi hinterlandnya. Khusus untuk Rongga upaya pengembangan aktivitas ekonominya harus hati-hati karena sebagian besar wilayahnya adalah kawasan konservasi yang sangat diperlukan untuk melindungi keberadaan waduk Saguling. Karena itu lebih baik Kecamatan Rongga diarahkan untuk wisata sedangkan untuk aktivitas pertanian di Kecamatan Sindangkerta dan Gununghalu.

#### 4.11.3 Rekomendasi program per Lokasi

Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong merupakan wilayah kecamatan yang aktivitas ekonominya berbasis kepada sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan, juga peternakan, agrowisata, ekowisata dan wisata bunga. Perbedaannya di Kecamatan Lembang aktivitas pertaniannya bersifat padat modal sehingga kurang menyerap tenaga kerja, sedangkan di Kecamatan Cisarua dan Parongpong aktivitas pertaniannya lebih bersifat padat karya yaitu menyerap tenaga kerja banyak. Perbedaan lainnya aktivitas sektor pertanian di Kecamatan Lembang mampu mendorong berkembangnya perekonomian wilayah (nilai PDRB total relatif tinggi), sementara di Kecamatan Cisarua dan Parongpong aktivitas sektor pertanian belum mampu mendorong berkembangnya perekonomian wilayah. Selain itu di Kecamatan Lembang juga berkembang aktivitas pemasaran dan aktivitas *urban* namun ancamannya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Rekomendasi kebijakan untuk Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong, yaitu:

- a. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura, peternakan, dan wisata di tiga kecamatan;
- b. Pengendalian konversi lahan di Kecamatan Lembang agar pertanian tetap menjadi *leading sector*;

- c. Pembangunan pusat pemasaran untuk produk pertanian pangan dan peternakan di Kecamatan Lembang;
- d. Pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan rakyat, wisata bunga dan wisata alam di Kecamatan Cisarua dan Parongpong;
- e. Membangun keterkaitan antara Kecamatan Cisarua dan Parongpong sebagai *hinterland* dengan Kecamatan Lembang sebagai pusat untuk membuka lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan dan pariwisata (agrowisata, dan ekowisata).

Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Cipatat merupakan wilayah kecamatan berbasis perkebunan. Perbedaannya aktivitas perkebunan di Kecamatan Cipatat mampu mendorong perekonomian wilayah (nilai PDRB Total relatif tinggi), sementara di kecamatan Cipeundeuy dan Cipatat aktivitas perkebunan belum mampu mendorong perekonomian wilayah. Rekomendasi kebijakan untuk kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Cipatat, yaitu: (1) pengembangan aktivitas sektor perkebunan di ketiga kecamatan; dan (2) pengembangan pusat pelayanan untuk pengembangan perkebunan di Cipatat.

Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy merupakan wilayah kecamatan yang memiliki potensi wisata yang berupa wisata waduk (Cipeundeuy) dan wisata perkebunan (Cikalongwetan). Rekomendasi kebijakan adalah pengembangan wisata di Cipeundeuy yaitu wisata waduk Cirata harus didorong melalui upaya perbaikan akses jaringan jalan dan pengembangan wisata di Cikalongwetan harus diintegrasikan dengan pengembangan aktivitas perkebunan.

Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar merupakan wilayah kecamatan yang aktivitas ekonominya berbasis kepada sektor industri. Sayangnya industri yang berkembang tidak terkait dengan sumber daya lokal. Tumbuhnya industri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain itu di ketiga kecamatan ini juga berkembang aktivitas perdagangan dan pemasaran. Rekomendasi kebijakan ketiga kecamatan ini tidak lagi diarahkan untuk pengembangan kawasan industri skala menengah sampai besar, sebisa mungkin diarahkan pada kegiatan agroindustri. Ketiga kecamatan ini dapat

menjadi etalase bagi produk-produk agribisnis, agroindustri, dan UMKM dari Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Cililin, Cihampelas, dan Sindangkerta merupakan wilayah kecamatan, dimana kehidupan masyarakatnya bergantung kepada aktivitas ekonomi di Kota Bandung dan Kota Cimahi, dengan rekomendasi kebijakan pembangunan di ketiga kecamatan tersebut harus ditingkatkan.

Kecamatan Cipeundeuy, Cililin, dan Cihampelas merupakan wilayah potensi perikanan. Rekomendasi kebijakannya adalah perlu peningkatan produksi dan produktivitas serta pengolahan hasil perikanan di wilayah tersebut mengingat peluang pasar yang terbuka lebar, maka perlu didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mempermudah pemasaran produk perikanan.

Kecamatan Sindangkerta dan Gununghalu memiliki potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan (padi sawah) dan hortikultura, rekomendasi kebijakannya adalah perlunya upaya pengembangan lahan tanaman pangan dan hortikultura untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kecamatan Gununghalu dan Rongga memiliki karakteristik aktivitas ekonomi kehutanan, namun tidak berkelanjutan. Rekomendasi kebijakannya adalah perlu upaya penegakan hukum.

Kecamatan Rongga dan Cipongkor memiliki karakteristik kawasan konservasi yang cukup luas, dan sangat menentukan keberlanjutan Waduk Saguling dengan rekomendasi kebijakan sebagai kawasan konservasi yang harus diperhatikan. Lihat Lampiran 13.

## 4.12 Program Unggulan dan Lokasi Prioritas

Dari 5 (lima) program unggulan yang dijabarkan dalam bentuk strategi yang mengarah kepada berbagai program dan lokasi prioritas, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan telah ditentukan program yang bisa menunjukkan keberhasilan berjalannya RPJMD di lokasi prioritas.

Jenis program unggulan dengan lokasi prioritas yang diusulkan adalah:

1. Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua (Kabupaten Bandung Barat bagian utara) program yang akan dilakukan adalah pengendalian terhadap alih fungsi lahan dan peningkatan akses masyarakat terhadap sektor agribisnis dan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
2. Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan (Kabupaten Bandung Barat bagian barat): Pengembangan Waduk Cirata sebagai wisata ramah lingkungan yang didukung agroindustri jagung, buah-buahan dan perikanan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan terpadu;
3. Kecamatan Cipatat (Kabupaten Bandung Barat bagian barat): Pengembangan keterpaduan Waduk Saguling, air terjun Curug Jawa, panjat tebing, arung jeram, sumber air panas Cisameng, dan cagar budaya Gua Pawon sebagai objek wisata ramah lingkungan yang didukung agroindustri jagung dan buah-buahan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
4. Kecamatan Cipongkor dan Sindangkerta (Kabupaten Bandung Barat bagian selatan): Pengembangan keterpaduan Waduk Saguling (Desa Baranangsiang) sebagai objek wisata ramah lingkungan, wisata ziarah Tiga Waliyulloh yang didukung agroindustri palawija dan sayuran melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
5. Kecamatan Cililin dan Cihampelas (Kabupaten Bandung Barat bagian selatan): Pengembangan keterpaduan Waduk Saguling dan air terjun Curug Sawyer, sebagai wisata ramah lingkungan yang didukung oleh agroindustri perikanan dan makanan olahan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
6. Kecamatan Rongga dan Gunung Halu (Kabupaten Bandung Barat bagian selatan): Pengembangan keterpaduan hutan dan air terjun Curug Malela sebagai objek wisata ramah lingkungan yang didukung oleh agroindustri perkebunan dan kehutanan melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), pemberdayaan UMKM, dan koperasi;
7. Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar (Kabupaten Bandung Barat bagian tengah) sebagai etalase Kabupaten Bandung Barat: Pengembangan keterpaduan Situ Ciburuy sebagai objek wisata ramah

lingkungan, Wisata Iptek, Wisata Belanja, industri manufaktur, pusat perdagangan, jasa, dan pusat pemerintahan.